

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang sangat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, khususnya untuk melakukan analisis hasil upaya pelaksanaan pembangunan ekonomi negara atau wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa yang di produksi dalam masyarakat menjadi tumbuh dan sejahtera dan membuat masyarakat semakin berkembang. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan bila produksi barang dan jasa meningkat di banding tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana kegiatan perekonomian akan menghasilkan pendapatan tambahan bagi masyarakat selama jangka waktu tertentu.

Pertumbuhan Ekonomi mempunyai dua dampak yang sangat penting yaitu pertama meningkatkan kemakmuran atau standar hidup yang di capai oleh masyarakat, yang kedua adalah keterbukaan peluang kerja baru bagi penduduk yang semakin banyak jumlahnya.

Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi suatu proses dimana keadaan perekonomian suatu negara berubah secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu menuju suatu keadaan yang dianggap lebih baik. Pertumbuhan ekonomi, sebagai proses peningkatan produksi dari waktu ke waktu menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara.

Dalam melaksanakan pembangunan, tujuan utama negara berkembang adalah pertumbuhan yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi suatu periode tertentu tidak dapat dipisahkan terhadap perkembangan setiap sektor atau subsektor yang berpartisipasi menciptakan nilai tambah bagi perekonomian daerah.

Menurut (Jannah, 2020) pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memiliki definisi yang berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan.

Menurut (Amdan & Sanjani, 2023) Pertumbuhan ekonomi itu sendiri dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi sumber daya yang dapat dikendalikan (*invisible resource*), sumber daya manusia (*human resource*), kewirausahaan (*enterprise*) dan *teknologi*.

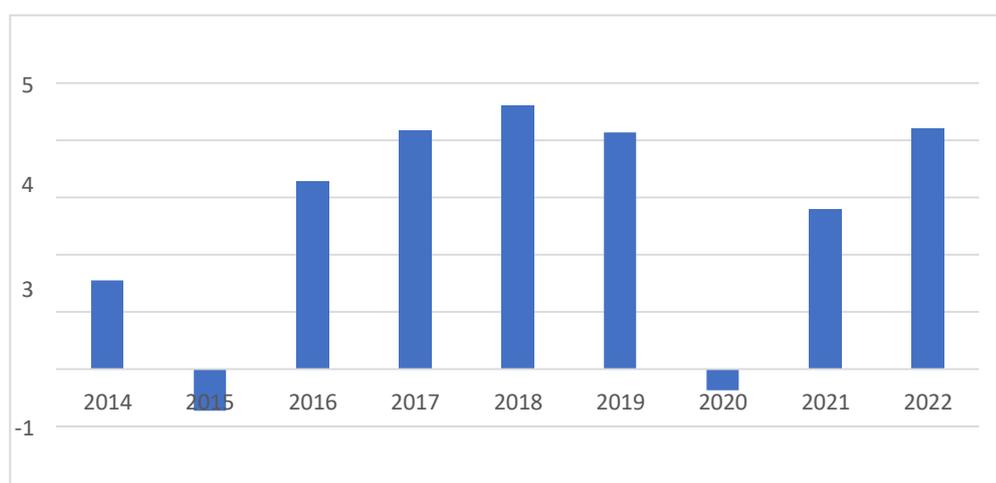
Adanya keseimbangan dalam suatu perekonomian salah satu target dalam rangka pertumbuhan peningkatan perekonomian suatu negara. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh terus mengalami perubahan dari tahun 2014-2022.

Pada tabel 1.1 diketahui jumlah data laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh dari tahun 2014-2022.

Tabel 1.1
Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh 2014-2022

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi	Selisih	%
2014	1,55		
2015	-0,73	1.06	0,0228
2016	3,29	2.28	0,0402
2017	4,18	4.02	0,0089
2018	4,61	0.89	0,0043
2019	4,14	0.43	0,0047
2020	-0,37	0.47	0,0451
2021	2,79	4.51	0,0316
2022	4,21	3.16	0,0142

Sumber: BPS Provinsi Aceh, 2024



Gambar 1.1
Grafik Presentase Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh

Berdasarkan tabel dan grafik di atas menunjukkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh pada tahun 2014 sebesar 1,55%. Pada tahun 2015 terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi Aceh. Hal ini disebabkan oleh rendahnya Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki oleh Provinsi Aceh ditahun tersebut, hal tersebut juga dikarenakan adanya inflasi ringan di wilayah Aceh. Hal ini juga terjadi akibat kekosongan migas, kondisi ini lantaran beberapa faktor seperti adanya gangguan produksi yang tidak direncanakan (*unplanned shutdown*). Dan pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Aceh mengalami peningkatan sampai

tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh tingginya nilai APBD di wilayah tersebut yang menyebabkan ekonomi menjadi lebih stabil. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi di Aceh kembali mengalami penurunan yang sangat besar sebanyak 3,16% menjadi -0,37. Hal ini terjadi akibat dampak pandemi Covid-19, karena adanya pembatasan aktivitas masyarakat untuk mencegah Covid-19. Akibat dari pandemi Covid-19 ini memberikan dampak buruk bagi seluruh elemen masyarakat, baik masyarakat menengah atas maupun masyarakat menengah ke bawah. Kemudian setelah tahun 2020 pertumbuhan ekonomi provinsi Aceh mengalami sedikit peningkatan dimana pada tahun 2021 nilai pertumbuhan ekonomi mencapai 1,24% menjadi 2,79% di banding tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 meningkat hingga mencapai nilai 4,21%. Hal ini terjadi karena membaiknya mobilitas masyarakat dengan redanya angka infeksi Covid-19 dan penghapusan PPKM. Hal ini sejalan dengan teori Arsyad (2017) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berdampak pada peningkatan pembangunan suatu wilayah, baik buruknya pembangunan di suatu wilayah tergantung dari pertumbuhan ekonomi.

Provinsi Aceh memiliki jumlah penduduk sebanyak 5.033.000 jiwa dan mayoritas beragama Islam. Banyaknya penduduk dapat menggambarkan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data dari BPS jumlah penduduk muslim di Aceh sebanyak 98,19%. Dengan mayoritas penduduk muslim ini, tentunya membuat masyarakat di Provinsi Aceh memegang teguh prinsip-prinsip agama Islam dalam berkehidupan bermasyarakat.

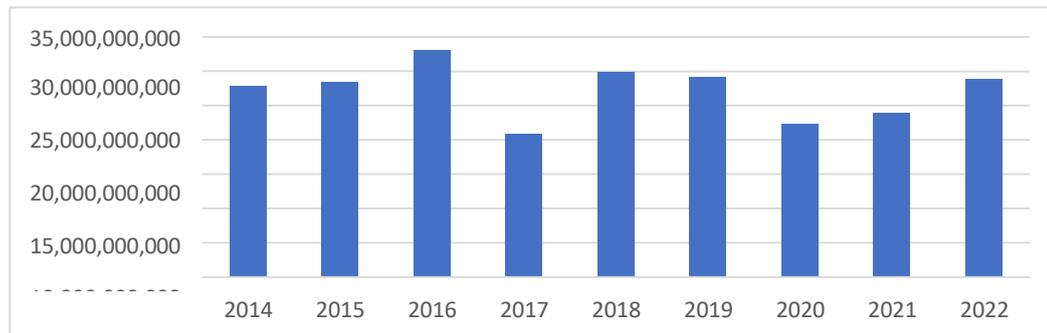
Islam telah mengajarkan bahwa setiap muslim diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya guna membersihkan jiwa dan harta yang dimilikinya, namun dalam mengeluarkan zakat harus didasarkan pada hati yang ikhlas tanpa mengharap ridha apapun dari Allah SWT. Zakat adalah salah satu kewajiban umat Islam yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Inilah mengapa zakat merupakan hal wajib dan penting bagi umat Islam. Selain itu zakat merupakan mediator dalam mensucikan diri dan hati dari rasa kikir, pelit dan cinta harta, dan zakat merupakan instrumen sosial yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir dan miskin (Sari, 2018).

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, ialah dimensi *hablum minallah* dan *hablum minannas*. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Islam dibalik kewajiban zakat, Secara umum zakat bertujuan untuk menutupi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan dari harta kekayaan sebagai perwujudan dari rasa tolong menolong antara sesama manusia beriman, sehingga hal ini akan berdampak baik bagi pengurangan angka kemiskinan dan berdampak juga pada pertumbuhan ekonomi yang semakin maksimal (Hafidhuddin, 2019).

Tabel 1.2
Penerimaan Zakat di Provinsi Aceh tahun 2014-2022

Tahun	Zakat (Milyaran Rupiah)	Selisih	%
2014	27,811,920,001		
2015	28,320,762,001	1,587,932,891	0,1587
2016	32,980,100,890	508,842,000	0,0508
2017	20,865,887,165	4,659,338,889	0,4659
2018	29,876,890,001	12,114,213,725	1,2114
2019	29,120,768,900	9,011,002,836	0,9011
2020	22,349,130,000	756,121,101	0,0756
2021	23,867,888,880	6,771,638,900	0,6771
2022	28,789,891,000	1,518,758,880	0,1518

Sumber: *Baitul Mal Aceh, 2024*



Gambar 1.2
Grafik Distribusi Zakat Provinsi Aceh Tahun 2014-2022

Berdasarkan uraian tabel di atas, diketahui bahwa penerimaan zakat di Provinsi Aceh tahun 2014-2022 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2014-2016 mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kesadaran masyarakat dalam berzakat sangat tinggi dan juga tidak adanya ketimpangan pada masyarakat di tahun tersebut. Pada tahun 2017 mengalami penurunan yang diakibatkan oleh adanya penurunan anggaran pendapatan pemerintah. Pada tahun 2020 juga mengalami penurunan kembali diakibatkan oleh adanya pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 sampai 2022, nilai zakat mulai meningkat seiring dengan stabilnya perekonomian di Provinsi Aceh. Sehingga hal tersebut berdampak pada pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Hal ini sesuai dengan penelitian (Anggraini et al., 2018) menyatakan bahwa zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian (Permatasari, 2020) hasil penelitiannya juga menunjukkan bahwa dana zakat, infaq dan shadaqah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena telah menjadi bagian dari tujuan pertumbuhan ekonomi yaitu mensejahterakan masyarakat dengan meningkatnya nilai APBD.

Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik disebabkan oleh faktor sumber daya yang dapat menggerakkan jalannya kegiatan pemerintah daerah. Faktor keuangan merupakan faktor utama dari sumber daya finansial yang digunakan sebagai pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Menurut (Saragih 2018) keuangan daerah berarti segala bentuk kekayaan milik daerah yang berhubungan dengan seluruh hak dan kewajiban daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan daerah yang ada di dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Dalam pelaksanaan desentralisasi dibiayai atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.

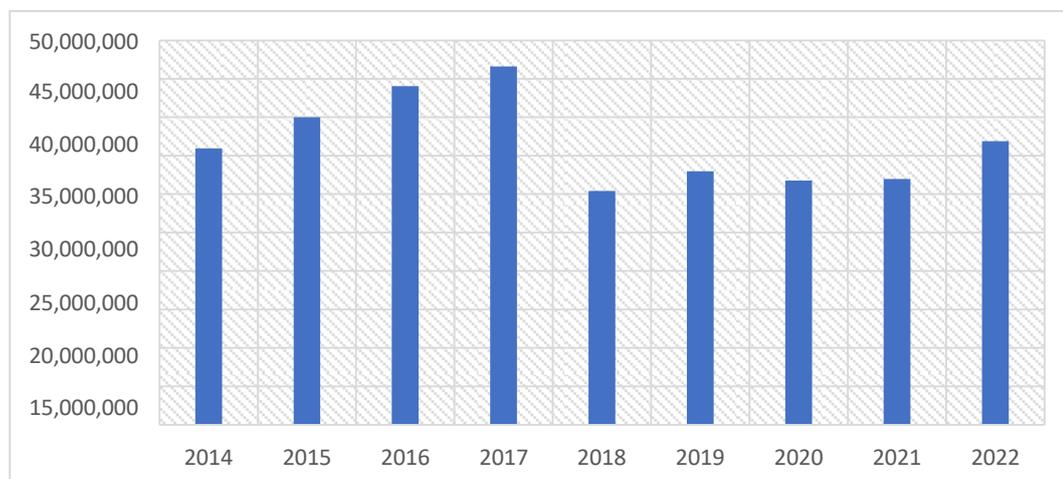
Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan daerah karena APBD mencerminkan bagaimana suatu daerah dapat menggali dan mengelola potensi sumber pendapatan serta mendistribusikan pendapatan tersebut untuk belanja dan pembiayaan daerah secara tepat. Penyelenggaraan keuangan daerah akan berjalan dengan baik dan optimal apabila terdapat keseimbangan antara sumber-sumber penerimaan daerah dengan pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah sehingga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat lebih maksimal.

Pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah otonom yang diberi keleluasan untuk mengatur pendanaannya dalam

memenuhi kebutuhan daerahnya sebagai perwujudan pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan, sumbernya terdiri dari, pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sumber pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah dari seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh tahun 2014 dan 2016 hanya memberikan kontribusi sebesar 9%, tahun 2017 sebesar 7% dan tahun 2022 sebesar 9%. Persentase tersebut belum mampu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap total pendapatan daerah dari seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh. Kontribusi PAD yang memadai menentukan tingkat kemandirian daerahnya dalam memenuhi belanja kebutuhan daerahnya sehingga tidak selalu bergantung kepada bantuan pemerintah pusat, apabila suatu saat dana perimbangan sudah tidak berlaku lagi.

Sumber pendapatan utama pada seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh berasal dari dana perimbangan. Dana perimbangan atau dana transfer adalah sumber pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan pemerintah daerah dalam mencapai otonomi daerah. Dana perimbangan dari seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap total pendapatan daerahnya yaitu tahun 2012 sebesar 67%, tahun 2014 sebesar 63%, tahun 2016 sebesar 50% dan tahun 2022 sebesar 59%. Dana transfer diberikan oleh pemerintah pusat dikarenakan adanya ketidaksamaan kekayaan sumber daya alam yang ada di

Indonesia, sehingga apabila PAD sangat kecil kontribusinya maka dana perimbangan dapat membantu pembiayaan belanja daerahnya. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana ini dengan efektif dan efisien untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat disertai dengan pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut. Realisasi penggunaan APBD dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Sumber: *BPS Provinsi Aceh, 2024*

Gambar 1.3
Jumlah APBD Provinsi Aceh tahun 2014-2022

Berdasarkan grafik di atas, menjelaskan bahwa anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Provinsi Aceh mengalami fluktuasi setiap tahunnya dimana pada tahun 2014-2017 APBD meningkat, hal ini menandakan bahwa adanya pembangunan yang baik di Provinsi Aceh, dimana APBD mengatur pengeluaran dan pendapatan daerah dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan daerah secara umum. Pada tahun 2020 APBD mengalami penurunan hal ini disebabkan oleh adanya pandemi di

Provinsi Aceh yang menyebabkan pembatasan segala macam aktivitas baik ekonomi dan lainnya. Namun pada tahun 2021-2022 APBD mengalami kenaikan kembali dikarenakan di tahun tersebut Provinsi Aceh sedang menstabilkan perekonomiannya dengan cara meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui anggaran APBD.

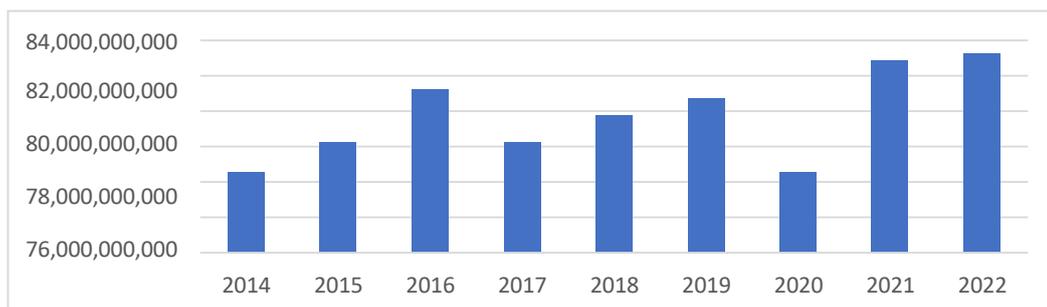
Pengeluaran pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Semakin tinggi pengeluaran pemerintah akan hal pembangunan suatu daerah, maka akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah infaq. Menurut (Wahidmurni, 2017) infaq merupakan pondasi Islam yang tuntunannya untuk terus menjaga keseimbangan kehidupan manusia. Infaq adalah syariat Islam yang diturunkan sebagai sarana pencipta keadilan ekonomi dan kesejahteraan bagi mereka yang tidak berdaya. Dalam ini infaq berperan dalam penyalarsaan kesejahteraan masyarakat melalui pembagian infaq bagi fakir miskin dan anak yatim sehingga hal ini dapat memperbaiki perekonomian suatu wilayah dan menjadikan pertumbuhannya menjadi lebih baik. Untuk lebih jelasnya data penerimaan infaq dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.3
Infaq di Provinsi Aceh tahun 2014-2022

Tahun	Infaq (Milyaran Rupiah)	Selisih	%
2014	76,543,300,210		
2015	78,230,980,999	6,220,687,790	0,6220
2016	81,210,908,902	1,687,680,789	0,1678
2017	78,234,876,000	2,979,927,903	0,2972
2018	79,765,769,100	2,976,032,902	0,2976
2019	80,732,899,001	1,530,893,100	0,1530
2020	76,544,762,901	967,129,901	0,9671
2021	82,877,980,010	4,188,136,100	0,4188
2022	83,212,654,877	6,333,217,109	0,6333

Sumber: *Baitul Mal Aceh, 2024*



Gambar 1.4
Grafik Distribusi Infaq Provinsi Aceh Tahun 2014-2022

Berdasarkan uraian tabel di atas, diketahui bahwa penerimaan infaq di Provinsi Aceh tahun 2014-2022 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2014, 2017 dan 2020 penerimaan infaq mengalami penurunan. Pada tahun 2020 hal ini disebabkan oleh pembatasan kegiatan ekonomi akibat wabah pandemi Covid-19. Pada tahun 2021-2022 penerimaan infaq kembali meningkat sebesar Rp.82,877,980,010, milyar dan Rp.83,212,654,877 milyar. Infaq dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah dikarenakan dengan adanya infaq dapat mengurangi angka kemiskinan di wilayah tersebut. Hal ini sesuai dengan penelitian (Anggraini et al., 2018) menyatakan bahwa infaq berpengaruh positif

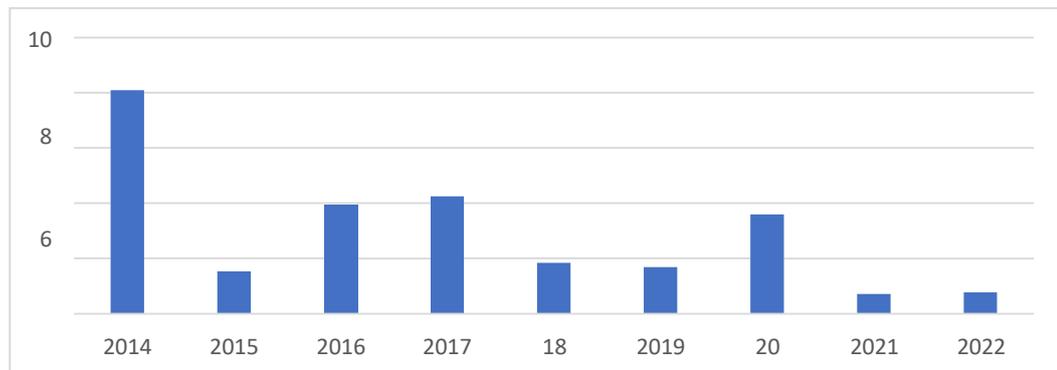
dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian (Permatasari, 2020) hasil penelitiannya juga menunjukkan bahwa dana infaq berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena telah menjadi bagian dari tujuan pertumbuhan ekonomi yaitu mensejahterakan masyarakat.

Apabila perekonomian suatu negara mengalami suatu kelesuan, maka Bank Indonesia dapat melakukan kebijakan moneter yang ekspansif dengan cara menurunkan tingkat suku bunga. Inflasi yang tinggi dan tidak stabil merupakan cerminan dari ketidakstabilan perekonomian yang berakibat pada naiknya tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus, dan berakibat pada makin tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia. Karena semakin tinggi tingkat inflasi, maka masyarakat yang awalnya dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan adanya harga barang dan jasa yang tinggi tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehingga menimbulkan kemiskinan dan tingkat inflasi mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Perkembangan nilai inflasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.4
Jumlah Inflasi di Provinsi Aceh Tahun 2014-2022

Tahun	Inflasi	Selisih	%
2014	8.09		
2015	1.53	6.56	0.0656
2016	3.95	2.42	0.0242
2017	4.25	0.3	0.003
2018	1.84	2.41	0.0241
2019	1.69	0.15	0.0015
2020	3.59	1.9	0.019
2021	0.71	2.88	0.0288
2022	0.77	0.06	0.0006

Sumber: BPS Provinsi Aceh, 2024



Gambar 1.5
Grafik Inflasi Provinsi Aceh

Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat inflasi di provinsi Aceh pada tahun 2014 tingkat inflasi di Provinsi Aceh mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya hal ini disebabkan karena kenaikan biaya produksi, pada tahun 2015 tingkat inflasi mengalami penurunan menjadi 1,53%. Hal ini berarti pemerintah mampu meningkatkan hasil produksi, mempermudah masuknya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat (tingkat upah), menetapkan harga maksimum, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang. Pada tahun 2016 tingkat inflasi terus mengalami kenaikan sampai pada tahun 2017, pada tahun 2018-2019 tingkat inflasi kembali mengalami penurunan dan di tahun 2020 tingkat inflasi di provinsi Aceh mengalami kenaikan kembali hal ini terjadi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020, Provinsi Aceh juga merupakan Provinsi yang terkan wabah pandemi Covid-19. Namun, pada tahun 2021-2022, Provinsi Aceh kembali menata perekonomiannya, sehingga tingkat inflasi mengalami penurunan. Artinya inflasi pada tahun 2021-2022 tercatat deflasi sebesar 0,03% (mtm), sehingga

secara tahunan menurun menjadi 2,84% dari realisasi bulan sebelumnya sebesar 3,00%. Inflasi yang terjaga ini merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter serta eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) melalui penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah.

Menurut (Simanungkalit, 2020c) Inflasi dapat berdampak positif atau negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, tergantung pada apakah inflasi itu ringan atau tinggi. Inflasi ringan mempunyai dampak positif apabila inflasi yang dihasilkan mampu mendorong perbaikan perekonomian yang dibuktikan dengan peningkatan pendapat nasional yang berimbang pada peningkatan investasi atau tabungan. Sebaliknya jika inflasi yang tidak terkendali atau tinggi akan menimbulkan hiperinflasi yang tentunya akan berdampak negatif. Inflasi tersebut menyebabkan kenaikan harga secara cepat, penurunan daya beli masyarakat, penurunan investasi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan penelitian (Fadila & Purnamasari 2021) yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu Indeks pembangunan manusia (IPM)

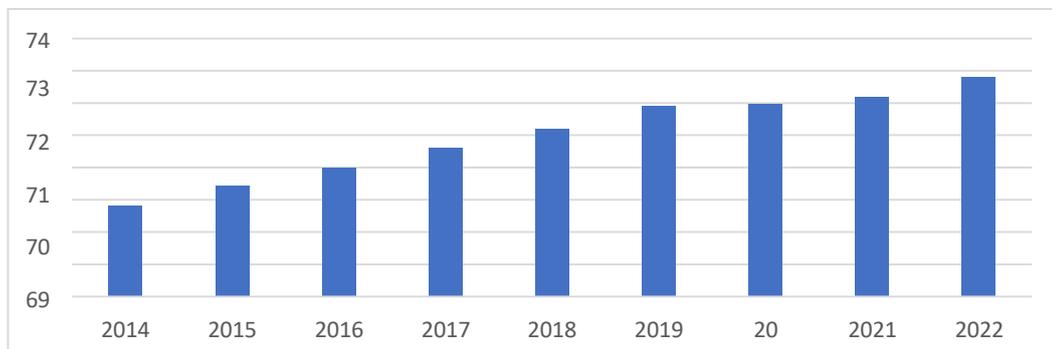
Menurut (Muqorrobin & Soejoto, 2017) Indeks pembangunan manusia (IPM) adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik dari suatu penduduk. Indeks pembangunan manusia (IPM) memegang peran penting terhadap pembangunan perekonomian, karena pembangunan manusia yang baik memungkinkan untuk memaksimalkan faktor-

faktor produksi, populasi yang berkualitas dapat melakukan inovasi untuk mengembangkan pelaku produksi yang ada.

Tabel 1.5
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi Aceh tahun 2014-2022

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Selisih	%
2014	68.81		
2015	69.45	0.64	0.0064
2016	70,00	0.55	0.0055
2017	70.60	0.6	0.006
2018	71.19	0.59	0.0059
2019	71.90	0.71	0.0071
2020	71.99	0.09	0.0009
2021	72.18	0.19	0.0019
2022	72.80	0.62	0.0062

Sumber: *BPS Provinsi Aceh, 2024*



Gambar 1.6
Grafik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Aceh

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, dapat diketahui bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di provinsi Aceh pada tahun 2014 sampai tahun 2022 mengalami kenaikan drastis. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Aceh terus mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor termasuk peningkatan dalam dimensi dimensi yang membentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM), seperti umur panjang dan hidup sehat, pendidikan, dan standar hidup layak, selain itu kenaikan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan kesehatan masyarakat.

Penelitian (Rahmawati, 2019) menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia terhadap pertumbuhan ekonomi dapat bervariasi tergantung pada lokasi dan kondisi spesifik. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang mengukur kualitas fisik dan non fisik penduduk (Andiyani, 2012). Kualitas fisik tercermin pada angka harapan hidup, sedangkan kualitas non fisik tercermin pada rata-rata lama bersekolah dan melek huruf penduduk. Selain itu, pembangunan manusia yang tinggi menyebabkan tingginya jumlah penduduk sehingga meningkatkan konsumsi. Hal ini menguntungkan untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan pembahasan sejauh mana pengaruh Zakat, Infaq, Inflasi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh pada tahun 2014 sampai dengan 2022. Sehingga penulis melakukan penelitian proposal skripsi dengan judul: **“Pengaruh Zakat, Infaq, Inflasi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh Tahun 2014-2022”**.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pengaruh Zakat terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh tahun 2014-2022?

2. Bagaimana pengaruh Infaq terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh tahun 2014-2022?
3. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh tahun 2014-2022?
4. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Aceh tahun 2014-2022?
5. Bagaimana pengaruh Zakat, Infaq, Inflasi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Aceh tahun 2014-2022?

1.2 Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengumpulkan bukti empiris mengenai:

1. Untuk mengetahui pengaruh Zakat terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh tahun 2014-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh Infaq terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh tahun 2014-2022.
3. Untuk mengetahui pengaruh Inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh tahun 2014-2022.
4. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh tahun 2014-2022.
5. Untuk mengetahui pengaruh Zakat, Infaq, Inflasi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Aceh tahun 2014-2022.

1.3 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini antara lain:

1. **Bagi Akademis**

Bagi akademis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para peneliti dan peneliti selanjutnya yang mempelajari topik serupa terkait pertumbuhan ekonomi di provinsi Aceh.

2. **Bagi Pemerintah**

Bagi pemerintah daerah provinsi Aceh, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk menyusun strategi peningkatan provinsi Aceh.

3. **Bagi Peneliti**

Penelitian ini merupakan sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama proses pembelajaran di Universitas Malikussaleh pada program studi ekonomi syariah dan untuk memotivasi peneliti melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.